

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi penjelasan secara komprehensif mengenai referensi pustaka atau teori-teori yang berkaitan dan mendukung penelitian mengenai pengaruh dana otonomi khusus, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis, kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan memberi gambaran situasi serba kekurangan seperti terbatasnya modal yang dimiliki, rendahnya pengetahuan dan keterampilan, rendahnya produktivitas, rendahnya pendapatan, lemahnya nilai tukar hasil produksi orang miskin dan terbatasnya kesempatan berperan dalam pembangunan. Seseorang dapat dikatakan miskin atau hidup dalam kemiskinan jika pendapatan atau aksesnya terhadap barang dan jasa relatif rendah dibandingkan rata-rata orang lain dalam perekonomian tersebut (Badan Pusat Statistik, 2023)

2.1.2 Teori Kemiskinan *Vicious Circle of Poverty*

Menurut Nurkse (1971) kemiskinan berasal dari teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious Circle of Poverty*). Terjadinya kemiskinan disebabkan karena keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam sangat bergantung pada kemampuan produktif manusia. Jika penduduknya banyak yang miskin dan pendidikannya rendah, maka akan mengakibatkan kelangkaan keterampilan teknik, pengetahuan, dan aktivitas kewiraswastaan yang secara otomatis akan menyebabkan sumber daya alam tidak berkembang, dan bahkan salah digunakan. Di sisi lain, kurangnya sumber daya alam akan menyebabkan kemiskinan, karena sumber daya alam adalah sumber utama kebutuhan dalam kehidupan manusia. Kemiskinan sumber daya alam merupakan sebab dan sekaligus akibat kemiskinan manusia. Lingkaran setan kemiskinan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain yang menyebabkan kondisi pada suatu negara akan terus miskin dan akan menyulitkan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi untuk lebih tinggi. Teori yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan pada masa lalu, namun kemiskinan juga menjadi faktor penghambat dalam pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Dalam teori lingkaran setan kemiskinan juga disebutkan bahwa rendahnya produktivitas disebabkan adanya ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, dan ketertinggalan serta kurangnya modal.

2.1.3 Teori Kemiskinan Marjinal

Teori ini berasumsi bahwa setiap wilayah pasti mempunyai masyarakat dengan tingkat kehidupan rendah atau hidup miskin. Lewis (1966) adalah tokoh dari aliran teori Marjinal. Konsepnya yang terkenal adalah *Culture of Poverty*. Menurut Lewis, setiap masyarakat di dunia menjadi miskin disebabkan adanya budaya hidup rendah seolah-olah tidak peduli dengan kemajuan zaman, sehingga ingin hidup dengan semaunya sendiri tanpa ada perasaan untuk hidup jauh lebih baik, pasrah dengan keadaan, kurang pendidikan dan pengetahuan, kurang ambisi dalam membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi. Marjinal secara sosial dalam suatu masyarakat terpinggirkan dengan hidup terisolasi, karena mereka dianggap tidak mampu ataupun tidak diberikan ruang untuk mengakses sumber daya. Masyarakat yang terpinggirkan mencakup mereka yang lahir di sebuah kota dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk, taraf hidup yang rendah serta akses layanan yang terbatas.

2.1.4 Teori Kemiskinan Todaro

Menurut Todaro (2012) besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (*poverty line*). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional” garis tersebut tidak mengenal pembatas antar negara, dan juga

memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US\$1 atau \$2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Permasalahan kemiskinan bersifat kompleks yakni persoalan yang apabila tidak diatasi maka akan mempengaruhi atau memunculkan masalah baru yang menyangkut banyak aspek, sebab berhubungan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, dan tingkat kesehatan yang rendah. Kemiskinan menjadi masalah yang mendasar ataupun hal yang menjadi permasalahan utama di setiap negara di dunia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan derajat hidup yang layak dan untuk bertahan hidup.

2.1.5 Ukuran Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (2023) menjelaskan bahwa dalam mengukur konsep kemiskinan ialah menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Di dalam pendekatan ini kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran penduduk itu sendiri. Jadi, dalam hal ini penduduk yang dikategorikan miskin yaitu ketika rata-rata pengeluaran perkapita mereka berada di bawah garis

kemiskinan (*Head Count Index*). Adapun persentase penduduk miskin di provinsi dihitung dengan rumus berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Keterangan :

α = 0

z = Garis Kemiskinan

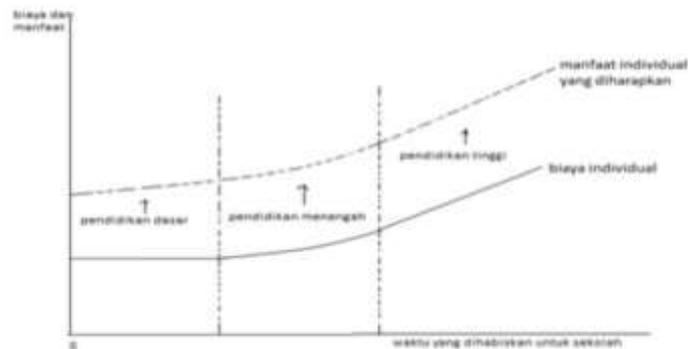
y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

2.1.6 *Human Capital Theory*

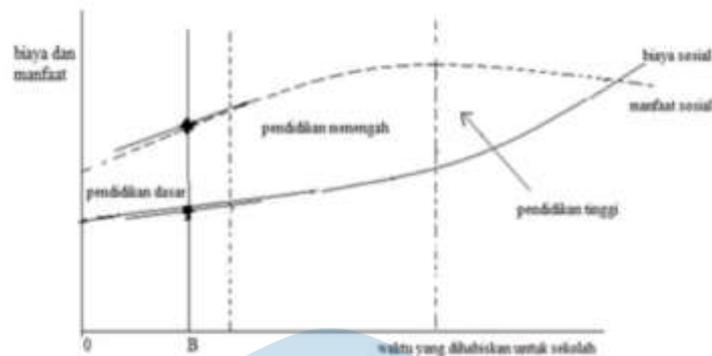
Menurut Todaro (2011) pembangunan manusia bisa diartikan sebagai proses memperoleh serta meningkatkan jumlah orang yang memiliki keahlian dalam bidang pendidikan dan pengalaman yang menentukan untuk pembangunan ekonomi dan politik di suatu negara. Pembangunan manusia juga merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk, hal ini dikarenakan manusia merupakan modal utama yang berperan dalam terciptanya pembangunan di suatu negara. Gambar 2.1 berikut menunjukkan biaya dan manfaat dari individual tentang pendidikan yang dicapai.



Sumber: Todaro dan Smith (2011)

Gambar 2. 1
Biaya dan Manfaat Individual

Gambar 2.1 menunjukkan tingginya tingkat pendidikan yang dicapai oleh seseorang mampu meningkatkan penghasilan yang akan dicapai, sehingga nantinya akan berdampak pada bertambahnya biaya hidup sehari-hari yang akan dikeluarkan. Biaya lain yang harus dikeluarkan adalah biaya pendidikan secara sosial. *Social of education* merupakan biaya yang harus dikorbankan oleh masyarakat seluruhnya, sebagian dampak dari adanya kebutuhan untuk membiayai pendidikan yang lebih tinggi dan mahal dengan biaya yang nantinya akan menjadi lebih produktif jika digunakan untuk kebutuhan sektor-sektor ekonomi yang lain. Biaya individu dan juga biaya sosial jika dibandingkan maka biaya pendidikan bagi masyarakat secara sosial jauh lebih kecil dari pada manfaat bagi individu (Todaro dan Smith, 2011). Gambar 2.2 berikut adalah manfaat dan biaya sosial yang berkaitan dengan tingkat pendidikan.



Sumber : Todaro dan Smith (2011)

Gambar 2. 2

Manfaat dan Biaya Sosial

Berdasarkan Gambar 2.2 ditunjukkan kurva biaya dan manfaat sosial pendidikan, kurva biaya sosial pada mulanya meningkat dengan naiknya tingkat pendidikan. Hal inilah yang menunjukkan adanya perbaikan tingkat produktivitas dari seseorang yang memiliki pendidikan dasar, kemudian kurva biaya sosial akan meningkat lebih lambat dan pada akhirnya cenderung mendatar. Kurva biaya sosial menunjukkan peningkatan yang rendah pada awal tahun pendidikan dasar, namun akan meningkat dengan cepat untuk pendidikan yang lebih tinggi.

Menurut Kumar (2006) konsep *human capital* muncul karena adanya pergeseran peranan sumber daya manusia. *Human capital* muncul dari pemikiran bahwa manusia merupakan *intangible asset* yang memiliki banyak kelebihan yaitu:

- 1) Kemampuan manusia apabila digunakan dan disebarkan tidak akan berkurang melainkan bertambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi organisasi.
- 2) Manusia mampu mengubah data menjadi informasi yang bermakna.
- 3) Manusia mampu berbagi intelegensia dengan pihak lain.

Menurut Becker (1993), hal-hal yang mendasari lahirnya konsep *human capital* adalah:

- 1) Manusia berinvestasi yang hasilnya dapat memberikan keuntungan dalam jangka waktu yang panjang.
- 2) Pekerja memiliki satu set keahlian yang dapat diberikan atau disewakan kepada majikan.
- 3) Menawarkan adanya akuisisi.

Menurut Stokley (2003) perlunya *human capital* pada masa sekarang berdasarkan pada:

- 1) Kuatnya tekanan persaingan keuntungan finansial dan nonfinansial.
- 2) Pemimpin bisnis dan politik mulai mengakui bahwa memiliki *skill* dan motivasi tinggi dapat memberikan perbedaan peningkatan kinerja yang signifikan.
- 3) Terjadi perubahan yang cepat dengan ditandai adanya proses dan teknologi yang baru, hal ini tidak akan bertahan lama apabila pesaing mampu menggunakan teknologi yang sama. Namun, untuk mengimplementasikan

perubahan, tenaga kerja yang dimiliki industri harus memiliki *skill* dan kemampuan yang lebih baik.

- 4) Untuk tumbuh dan beradaptasi, kepemimpinan organisasi harus mengenali nilai dan kontribusi manusia. Sesuatu yang dimiliki oleh manusia adalah kemampuan untuk mengubah data yang diperoleh menjadi suatu hal yang bernilai bagi organisasi.

2.1.7 Teori Ekonomika Kesehatan

Ekonomi adalah ilmu untuk membuat pilihan. Sumber daya di alam terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Demikian juga sumber daya kesehatan harus digunakan dengan efisien dan berkeadilan (Murti, 2011). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi.

Salah satu program pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana yang baik. Maka pembangunan kesehatan adalah kesehatan yang dapat mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi karena manusia yang sehat menciptakan manusia yang produktif dan mampu meningkatkan derajat kesehatan dirinya sendiri. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesehatan, pemerintah membuat program untuk pembangunan kesehatan seperti *Millennium Development Goals* (MDGs), bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki tujuan yang terbatas dan target terukur.

Mills dan Gillson (1999) mendefinisikan ekonomi kesehatan sebagai penerapan teori, konsep dan teknik ilmu ekonomi dalam sektor kesehatan. Ekonomi kesehatan berhubungan dengan beberapa hal berikut.

1. Alokasi sumber daya diantara berbagai upaya kesehatan.
2. Jumlah sumber daya yang dipergunakan dalam pelayanan kesehatan.
3. Pengorganisasian dan pembiayaan dari berbagai pelayanan kesehatan.
4. Efisiensi pengalokasian dan penggunaan berbagai sumber daya.
5. Dampak upaya pencegahan , pengobatan dan pemulihan kesehatan pada individu dan masyarakat.

Menurut Kharman (1964) menjelaskan bahwa ekonomi kesehatan itu merupakan aplikasi ekonomi dalam bidang kesehatan. Secara umum ekonomi kesehatan akan berkonsentrasi pada industri kesehatan. Berikut merupakan empat bidang yang tercakup dalam ekonomi kesehatan.

1. Peraturan (*regulation*).
2. Perencanaan (*planning*).
3. Pemeliharaan kesehatan (*the health maintenance*) atau organisasi.
4. Analisis *Cost* dan *Benefit*.

Pembahasan dalam ilmu ekonomi kesehatan mencakup *costumer* (dalam hal ini pasien atau pengguna pelayanan kesehatan) *provider* (yang merupakan profesional investor, yang terdiri dari *public* maupun *private*), dan pemerintah (*government*). Ilmu ekonomi kesehatan berperan dalam rasionalisasi pemilihan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan terutama

yang menyangkut penggunaan sumber daya yang terbatas. Dengan diterapkannya ilmu ekonomi dalam bidang kesehatan, maka kegiatan yang akan di laksanakan harus memenuhi kriteria efisiensi atau apakah kegiatan tersebut bersifat *Cost Effective*. Ada kalanya menerapkan ilmu ekonomi harus memenuhi kriteria *interest-efficient*, sedangkan pada kesehatan adalah *interest-individu*.

Nadhir (2020) menyatakan bahwa ilmu ekonomi kesehatan adalah penerapan ilmu ekonomi dalam upaya kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Perubahan mendasar terjadi pada sektor kesehatan, ketika sektor kesehatan menghadapi kenyataan bahwa sumber daya yang tersedia (khususnya dana) semakin hari semakin jauh dari mencukupi. Keterbatasan tersebut mendorong masuknya disiplin ilmu kesehatan dalam perencanaan, manajemen dan evaluasi sektor kesehatan.

Ekonomi kesehatan sebagai ilmu yang mempelajari *supply* dan *demand* sumber daya pelayanan kesehatan dan dampak sumber daya pelayanan kesehatan terhadap populasi. Ekonomi kesehatan perlu dipelajari, karena terdapat hubungan antara kesehatan dan ekonomi. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, dan sebaliknya ekonomi mempengaruhi kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih baik akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat keseluruhan jika membawa kesehatan yang lebih baik. Status kesehatan penduduk yang baik meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan per kapita, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Murti, 2011).

Tjiptoherijanto (1993) menyatakan bahwa kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan penambahan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja.

2.2 Dana Otonomi Khusus

2.2.1 Pengertian Otonomi Khusus

Otonomi Khusus (Otsus) merupakan salah satu varian konsep desentralisasi yang dikenal dengan desentralisasi asimetris (*asymmetrical decentralization*) yang diberlakukan khusus bagi beberapa daerah tertentu sebagai respons solutif, antara lain untuk mengatasi kesenjangan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Otsus Papua lahir untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan masa lalu yang memunculkan sumber-sumber ketegangan dalam wujud ketimpangan di berbagai sektor pembangunan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan pengabaian hak dasar penduduk asli. Perbedaan utama dan paling mendasar antara otonomi umum dan otonomi khusus terletak pada kewenangan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sesuai dengan konteks dan aspirasi masyarakat setempat. Pada dasarnya, Undang-Undang Otsus Papua memiliki filosofi perlindungan, pemberdayaan, dan pemihakan (Kemenkeu, 2018). Filosofi ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk berbagai persoalan di Tanah Papua. Harapannya, kebijakan

ini dapat menjadi instrumen efektif dalam mengakomodasi hak masyarakat Papua secara lebih proporsional serta menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di Papua, seperti kemiskinan, keterbelakangan, masalah sosial yang berkepanjangan, hingga kesenjangan ekonomi. Oleh karenanya, Otsus merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk mengakomodasi peningkatan dan perbaikan kesejahteraan daerah, serta mencari jalan tengah terhadap berbagai masalah yang terjadi di tanah Papua.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2021, otonomi khusus yaitu wewenang khusus yang ditetapkan serta ditampilkan untuk provinsi yang mendapat otonomi khusus dalam mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat lokal menurut usulan masing-masing daerah berdasarkan tujuan serta kewajiban dasar masyarakat. Berdasarkan peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 tahun 2017 tentang pengalokasian dana otonomi khusus dalam pasal 1 (8) bahwa dana otonomi khusus adalah penerimaan pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari APBN yang besarnya setara 2% dari alokasi umum nasional yang dipakai untuk melaksanakan otonomi khusus.

2.2.2 Kebijakan Otonomi Khusus

Badan Pemeriksa Keuangan (2019) mencatat bahwa setelah hampir 18 tahun pelaksanaan Undang-Undang Otsus Papua dan Papua Barat ini, hasil yang dicapai dianggap masih belum optimal sebagaimana dirasakan oleh berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan lainnya, termasuk dari OAP (Orang Asli Papua). Pemerintah pusat merasa kemajuan Papua dan Papua Barat dalam

berbagai aspek yang tidak sebanding dengan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Otsus. Pemerintah daerah menyatakan pelaksanaan Otsus belum optimal karena ketidakjelasan kewenangan Otsus, yakni kewenangan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat tidak jauh berbeda dengan Provinsi lainnya di Indonesia yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara OAP (Orang Asli Papua) menyatakan pelaksanaan Otsus belum membawa kemajuan berarti bagi kehidupan mereka. Data juga menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan, pendidikan dan kesehatan di Provinsi Papua dan Papua Barat selalu berada di urutan terbawah dan jauh di bawah rata-rata nasional. Selain itu, beberapa indikator capaian sejumlah pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat masih perlu ditingkatkan kualitasnya.

2.3 Angka Harapan Hidup

Dalam undang-undang No 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Beberapa ekonom beranggapan bahwa kesehatan merupakan fenomena ekonomi yang dapat dinilai dari stok maupun juga dinilai sebagai investasi sehingga fenomena kesehatan menjadi variabel yang nantinya dapat dianggap sebagai suatu faktor produksi untuk meningkatkan nilai tambah barang dan jasa, atau sebagai suatu sasaran dari berbagai tujuan yang ingin dicapai oleh individu, rumah tangga maupun masyarakat yang dikenal sebagai tujuan kesejahteraan. Oleh sebab itu, kesehatan dianggap sebagai modal yang memiliki tingkat pengembalian yang

positif baik untuk individu perorangan maupun untuk masyarakat luas. Menurut Badan Pusat Statistika (2023) angka harapan hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori.

2.4 Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepirtual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berusia 15 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Menurut standar *United Nation Development Programme* (UNDP) batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum yang ditargetkan adalah setara Sekolah Menengah Atas (SMA). Rata-rata lama sekolah mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi secara umum bahwa

semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kualitas seseorang, baik dari pola pikir maupun tindakannya. Atmanti (2005) berpendapat bahwa seseorang yang pendidikannya tinggi yang diukur dengan lamanya waktu bersekolah akan memiliki pekerjaan dan upah yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Pendidikan (formal dan non formal) berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka.

2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro dan Smith (2011) pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumber daya manusia dan fisik, yang berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif, dan dapat menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, teknologi yang digunakan akan semakin berkembang dan tenaga kerja juga akan semakin bertambah seiring dengan keterampilan yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-

faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Todaro, 2011).

Ada tiga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Todaro, 2011):

a. Akumulasi Modal

Termasuk investasi baru yang berwujud tanah, peralatan dan sumber daya manusia. Hal ini akan terjadi apabila pendapatan sekarang akan ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Berhubungan dengan kenaikan angka kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi, artinya semakin banyak angkatan kerja maka semakin banyak penduduk akan meningkatkan pasar domestiknya.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan yang disebabkan oleh cara-cara baru dan lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional seperti cara menanam padi, membuat pakaian dan sebagainya. Dengan klasifikasi kemajuan teknologi tersebut yaitu hemat tenaga kerja dan hemat modal.

2.6 Hubungan Antar Variabel Penelitian

2.6.1 Hubungan Dana Otonomi Khusus terhadap Tingkat Kemiskinan

Alokasi Dana Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua Barat yang digunakan untuk alokasi dana pendidikan dan kesehatan menurut UU No 2 Tahun 2021. Melalui dana transfer yang diserahkan bagi pemerintah pusat untuk pemerintah daerah dapat meningkatkan pembangunan misalnya melalui infrastruktur yang berdampak langsung terhadap penduduk miskin. Apabila dana tersebut digunakan dalam bentuk infrastruktur terutama bidang kesehatan dan pendidikan maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Kondisi kemiskinan menurut Todaro (2012) adalah penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang rendah. Dengan demikian, apabila alokasi dana otonomi khusus digunakan untuk infrastruktur maka akan menghambat peningkatan penyebab tingkat kemiskinan.

Terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa Alokasi Dana Otonomi Khusus dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam bentuk infrastruktur, di antaranya oleh (Muliadi dan Amri 2019), (Maisin,2015), (Budiratna,2020) dan (Ferdiansyah,2018).

2.6.2 Hubungan Angka Harapan Hidup terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro (2012) menyatakan bahwa *human capital* dapat diukur melalui kesehatan, karena kesadaran akan kesehatan memiliki keterkaitan dengan produktivitas yang akan menurunkan kemiskinan. Dalam kesehatan dapat menggunakan nilai angka harapan hidup (AHH) di mana tinggi angka harapan

hidup seseorang maka semakin berkualitas parameter kesehatannya sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya atau pendapatan seseorang maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Menurut Efendi *et al*, (2019) bahwa terdapat pengaruh negatif antara kesehatan dengan tingkat kemiskinan, di mana kesehatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, kesehatan merupakan salah satu faktor penting untuk menjalankan proses perekonomian, di mana kesehatan harus dimiliki oleh seluruh warga negara dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga hal tersebut akan berdampak pada peningkatan pendapatan yang akan dapat mengurangi kemiskinan.

2.6.3 Hubungan Rata-rata Lama Sekolah terhadap Tingkat Kemiskinan

Menurut Todaro (2012) menyatakan bahwa *human capital* dapat diukur melalui pendidikan, karena kesadaran akan pendidikan memiliki keterkaitan dengan produktivitas yang akan menurunkan kemiskinan. Dalam pendidikan dapat menggunakan nilai rata-rata lama sekolah (RLS) di mana tinggi rata-rata lama sekolah seseorang maka semakin berkualitas parameter kemampuan dan *skill* sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya atau pendapatan seseorang maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Menurut Amalia (2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa, karena pendidikan yang berkualitas dapat menentukan kualitas dari pembangunan. Melalui pendidikan, maka generasi manusia yang berkualitas dapat terlahir dan juga dengan lahirnya manusia yang berkualitas maka dapat menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan maksimal. Oleh karena itu, setiap manusia

haruslah selalu memperbaiki kualitas dirinya melalui pendidikan yang dilakukan dengan professional agar tujuan untuk pembangunan yang berkualitas akan tercapai dan berhasil dengan baik. Adhitya dan Kencana (2022) menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara pendidikan dengan tingkat kemiskinan. Pendidikan salah satu pengaruh yang penting dalam mengurangi kemiskinan, pendidikan formal menjadi salah satu modal bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Jika akses untuk pendidikan semakin baik maka semakin besar pula kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

2.6.4 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan keinginan setiap daerah bahkan negara. Pertumbuhan ekonomi sering dipakai untuk mengukur kemakmuran dan kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya akan berarti apabila diikuti oleh pemerataan atas hasil-hasil pembangunan yang pastinya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Menurut Suryandari (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi salah satu kunci untuk dapat menurunkan kemiskinan di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan suatu proses pembangunan dan merupakan syarat dalam pengurangan tingkat kemiskinan.

2.7 Studi Terkait

Penelitian Permana dan Arianti (2012) menganalisis tentang pengaruh pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di 34 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2004 – 2009. Data yang digunakan adalah data

sekunder dengan menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Safuridar (2017) meneliti tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh Timur dari tahun 2007 – 2015. Analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh Timur.

Budiratna (2020) menganalisis tentang realisasi penerimaan dana otonomi khusus dan pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat dari tahun 2013 – 2018. Analisis yang digunakan adalah analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2013 – 2018 terbukti signifikan turut dipengaruhi oleh penerimaan dana Otsus.

Manek dan Badrudin (2017) membahas tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas 21 kabupaten/kota dari tahun 2007 – 2016. Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder dengan metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Sedangkan dana perimbangan

tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan.

Amalia (2017) menganalisis tentang pengaruh pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan gender terhadap kemiskinan di 33 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 – 2013. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan ketidaksetaraan gender berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Sumatera Utara.

Adhitya *et al.*, (2022) meneliti tentang pengaruh pendidikan, kesehatan, sanitasi dan rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga terhadap kemiskinan di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2013 – 2020. Data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan metode analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendidikan dan sanitasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, sedangkan variabel kesehatan dan rata-rata jumlah anggota keluarga per rumah tangga tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

2.8 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori-teori maka diperoleh hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Diduga variabel dana otonomi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 13 kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022.

- 2) Diduga variabel angka harapan hidup berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 13 kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022.
- 3) Diduga variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 13 kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022
- 4) Diduga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 13 kabupaten/kota Provinsi Papua Barat tahun 2016 – 2022.

